

Sosialisasi Kesadaran Pajak (Tax Awareness) dan Simulasi E-Filing bagi Mahasiswa sebagai Calon Wajib Pajak

Tax Awareness Outreach and E-Filing Simulation for Students as Prospective Taxpayers

R Taufik Hidayat*¹, Nurul Alfiaturrohmah²

^{1,2}Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tri Bhakti, Bekasi, Indonesia

*Email corresponding: taufikgl09@gmail.com

ABSTRAK

Penerimaan pajak merupakan tulang punggung APBN, namun rasio kepatuhan nasional masih dihadapkan pada rendahnya *tax awareness* serta fobia birokrasi, termasuk di kalangan mahasiswa sebagai calon wajib pajak (*pre-taxpayer*). Padahal, maraknya tren *gig economy* membuat banyak mahasiswa telah menghasilkan pendapatan mandiri sebelum kelulusan. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pajak dan keterampilan praktis pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan melalui platform digital. Mitra kegiatan adalah 40 mahasiswa tingkat akhir dari rumpun non-akuntansi yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Metode intervensi menggunakan pendekatan *Service-Learning* dan *Problem-Based Learning* (PBL) yang diintegrasikan dengan bimbingan praktis menavigasi Aplikasi Simulator DJP Online. Evaluasi program dilakukan secara campuran (*mixed-methods*) melalui instrumen kuesioner *pre-test*, *post-test*, observasi partisipatif, dan *Focus Group Discussion* (FGD). Hasil evaluasi kuantitatif menunjukkan terjadinya lonjakan drastis pada rata-rata skor kognitif literasi perpajakan peserta, dari 30,0 menjadi 87,75. Pada dimensi psikomotorik, sebanyak 92,5% peserta sukses merampungkan siklus pengisian formulir *e-Filing* secara mandiri hingga menerbitkan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) fiktif berstatus nihil. Secara kualitatif, umpan balik peserta mengonfirmasi runtuhnya skeptisisme publik dan hilangnya rasa takut salah input data. Kesimpulannya, kombinasi antara penguatan nilai patriotisme fiskal dan metode simulasi visual interaktif terbukti efektif mentransformasi pola pikir anak muda menjadi calon wajib pajak yang patuh, mandiri, dan berintegritas.

Kata kunci: *Kesadaran Pajak, e-Filing, Calon Wajib Pajak, Simulator DJP Online, Literasi Perpajakan*

ABSTRACT

Tax revenue is the backbone of the national budget (APBN), yet the compliance ratio faces challenges from low tax awareness and bureaucratic phobia, particularly among university students as pre-taxpayers. In reality, the rise of the gig economy has enabled many students to generate independent income prior to graduation. This Community Service (PKM) activity aims to enhance tax awareness and practical skills in reporting the Annual Tax Return (SPT) through digital platforms. The program engaged 40 final-year non-accounting students selected via purposive sampling. The intervention methodology adopted a Service-Learning and Problem-Based Learning (PBL) framework integrated with hands-on guidance using the DJP Online Simulator Application. Program effectiveness was evaluated using mixed-methods through pre-test, post-test, participatory observation, and Focus Group Discussions (FGD). Quantitative results demonstrated a dramatic surge in the participants' average tax literacy cognitive score, escalating from 30.0 to 87.75. In the psychomotor dimension, 92.5% of participants successfully completed the e-Filing form independently until generating a fictitious non-taxable Electronic Receipt (BPE). Qualitatively, participant feedback confirmed the dissolution of public skepticism and the elimination of data entry anxiety. In conclusion, the combination of reinforcing fiscal patriotism values and interactive visual simulation methods is proven effective in transforming youth mindsets into compliant, independent, and high-integrity future taxpayers.

Keywords: Tax Awareness, e-Filing, Pre-Taxpayer, DJP Online Simulator, Tax Literacy

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional berkelanjutan di Indonesia sejatinya membutuhkan fondasi pembiayaan yang kokoh, mandiri, dan berkesinambungan. Dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), instrumen pajak menduduki posisi paling vital sebagai tulang punggung penerimaan negara. Pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber pembiayaan operasional pemerintahan (*budgetair*), tetapi juga sebagai instrumen pengatur (*regulerend*) untuk mendistribusikan kesejahteraan dan menstimulasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif (Santoso & Wibowo, 2025). Oleh karena itu, optimalisasi penerimaan pajak merupakan sebuah keniscayaan yang tidak dapat ditawar demi mewujudkan cita-cita kemandirian ekonomi bangsa dan melepaskan diri dari ketergantungan pembiayaan eksternal.

Di tengah konstelasi kondisi ekonomi global saat ini, urgensi terhadap optimalisasi penerimaan pajak domestik menjadi semakin krusial. Turbulensi ekonomi pasca-pandemi, dinamika geopolitik yang memicu fluktuasi harga komoditas, hingga bayang-bayang ancaman inflasi global menuntut pemerintah untuk memperkuat bantalan fiskal nasional (Wijaya et al., 2026). Ketergantungan pada utang luar negeri harus secara bertahap direduksi dengan cara memaksimalkan rasio penerimaan pajak (*tax ratio*) dari dalam negeri agar stabilitas makroekonomi tetap terjaga. Dalam kondisi ekonomi yang penuh ketidakpastian ini, partisipasi aktif warga negara dalam menunaikan kewajiban perpajakannya adalah bentuk nyata dari ketahanan bela negara di bidang ekonomi.

Namun, fenomena empiris menunjukkan bahwa upaya mengerek *tax ratio* di Indonesia masih dihadapkan pada tantangan struktural dan sosiologis yang cukup berat. Rasio pajak Indonesia tercatat masih berfluktuasi di angka yang relatif lebih rendah jika dikomparasikan dengan rata-rata negara tetangga di kawasan Asia Tenggara. Kesenjangan (*gap*) antara potensi kekayaan yang seharusnya bisa dipajaki dengan realisasi penerimaan yang masuk ke kas negara mengindikasikan masih tingginya angka ketidakpatuhan (*non-compliance*) di kalangan masyarakat (Nugroho & Putra, 2025). Fenomena ini menuntut adanya reformasi sistemik, tidak hanya berfokus pada penegakan hukum bagi pelanggar, tetapi juga pada aspek perluasan basis pajak yang menyasar kelompok usia produktif.

Merespons tantangan kepatuhan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Keuangan secara progresif terus membenahi kerangka regulasi perpajakan. Salah satu tonggak reformasi terpenting adalah disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Regulasi ini dirancang secara komprehensif untuk menambal celah kebocoran pajak, mengintegrasikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan menciptakan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum (Pratiwi & Setiawan, 2026). Di samping itu, landasan yuridis seperti Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) juga terus dioptimalkan penerapannya guna menstimulasi tingkat kepatuhan sukarela dari seluruh elemen masyarakat.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia secara fundamental menganut prinsip *Self-Assessment System*. Sistem ini memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri besaran pajak yang terutang secara mandiri (Lestari & Rahman, 2024). Pemberian kewenangan yang luas ini secara filosofis sangat menjunjung tinggi asas keadilan, namun pada praktiknya sangat rentan terhadap manipulasi jika tidak diimbangi dengan tingkat kesadaran pajak (*tax awareness*) dan literasi finansial yang tinggi. Tanpa adanya dorongan moral yang kuat dari dalam diri wajib pajak, *self-assessment* justru dapat bermuara pada fenomena penghindaran pajak (*tax avoidance*) hingga penggelapan pajak (*tax evasion*).

Untuk memfasilitasi dan mempermudah pelaksanaan *self-assessment* tersebut agar tidak memberatkan warga, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan lompatan transformasi digital secara masif. Administrasi perpajakan yang dahulu identik dengan tumpukan kertas dan antrean panjang di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) kini telah bermigrasi sepenuhnya ke dalam ekosistem digital. Modernisasi ini diwujudkan melalui kehadiran platform DJP Online, fasilitas *e-Billing* untuk pembuatan kode pembayaran, hingga *e-Filing* untuk kemudahan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan di mana saja (Fauziah & Anwar, 2025). Inovasi ini didesain untuk memangkas hambatan birokrasi, memberikan efisiensi waktu, dan mengadaptasi gaya hidup masyarakat modern.

Dalam konteks perluasan basis wajib pajak dan pemanfaatan ekosistem pelaporan digital tersebut, generasi muda yang saat ini duduk di bangku perguruan tinggi memegang posisi demografis yang amat strategis. Mahasiswa merupakan representasi murni dari generasi Z dan milenial akhir yang akan segera memasuki dunia kerja profesional, memosisikan mereka sebagai barisan Calon Wajib Pajak utama (Kusuma & Hidayat, 2025). Memasuki masa transisi bonus demografi, angkatan kerja berpendidikan tinggi inilah yang diproyeksikan akan menjadi tulang punggung penggerak roda perekonomian nasional di masa depan, sehingga wajah kepatuhan pajak negara lima tahun ke depan sangat bergantung pada literasi mereka saat ini.

Fenomena ekonomi kontemporer juga memperlihatkan pergeseran profil pendapatan yang masif di kalangan mahasiswa perguruan tinggi. Mahasiswa era kiwari tidak lagi hanya bermanuver di ranah akademik dan bergantung pada uang saku orang tua, melainkan banyak yang telah mampu mencetak penghasilan sendiri secara mandiri. Maraknya tren ekonomi gig (*gig economy*), pertumbuhan industri kreatif digital, proyek lepas (*freelance*), hingga inisiasi wirausaha rintisan (*startup*) di lingkungan kampus membuat mereka terpapar pada ambang batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) jauh lebih dini daripada generasi sebelumnya (Pratama & Susanti, 2024). Realitas ini menegaskan bahwa urgensi edukasi pajak tidak bisa lagi ditunda hingga masa kelulusan tiba.

Ironisnya, meskipun mahasiswa dewasa ini sangat fasih bermanuver dan mengadopsi teknologi di lanskap digital, tingkat literasi mereka terhadap regulasi dasar dan tata cara administrasi perpajakan masih tergolong sangat mengkhawatirkan. Berbagai survei pendahuluan mengindikasikan bahwa mayoritas mahasiswa mengalami kebingungan konseptual yang akut dalam mendefinisikan perbedaan antara pajak negara dan pungutan liar, apalagi memahami alur mekanisme pengisian SPT Tahunan (Siregar & Susanto, 2025). Kesenjangan (*gap*) antara tingginya kecakapan literasi digital dengan rendahnya literasi perpajakan ini menjadi semacam bom waktu yang dapat menghambat akselerasi rasio kepatuhan pajak di masa mendatang jika tidak segera diretas.

Rendahnya tingkat *tax awareness* di kalangan mahasiswa ini juga dipengaruhi secara tajam oleh hambatan psikologis dan sosiologis di ruang publik digital. Arus informasi yang masif dan tidak tersaring di platform media sosial sering kali mengekspos berita negatif terkait kebocoran anggaran negara atau perilaku indisipliner oknum aparat birokrasi, yang pada gilirannya mendistorsi persepsi murni generasi muda (Sari & Wulandari, 2026). Timbulnya skeptisisme dan sentimen apatisisme ini melahirkan bias kognitif yang menganggap bahwa membayar pajak hanyalah sebuah beban finansial belaka, bukan dimaknai secara luhur sebagai kontribusi gotong royong demi mendanai fasilitas publik dan subsidi pendidikan.

Selain hambatan bias persepsi tersebut, kendala teknis prosedural juga berdiri sebagai tembok tebal yang menghalangi terwujudnya kepatuhan sukarela. Mahasiswa sering kali merasa terintimidasi oleh bahasa hukum perpajakan yang dirasa kaku dan format formulir administrasi yang terkesan rumit. Pemahaman mengenai urgensi kepemilikan NPWP, tata cara pengajuan *Electronic Filing Identification Number* (EFIN), hingga langkah demi langkah melaporkan SPT secara nihil melalui platform *e-Filing* nyaris tidak pernah mereka peroleh di bangku perkuliahan jika mereka tidak bernaung di bawah program studi akuntansi (Wibowo & Hasanah, 2025). Ketidaktahuan teknis inilah yang acap kali mematikan inisiatif mereka untuk mencari tahu lebih lanjut.

Menghadapi kompleksitas krisis kesadaran dan literasi teknis tersebut, institusi pendidikan tinggi selaku agen peradaban diamanatkan untuk turun tangan menyodorkan solusi yang konkret. Melalui perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada domain Pengabdian kepada Masyarakat (PKM), sivitas akademika memiliki tanggung jawab moral untuk mendiseminasikan ilmu terapan langsung kepada kelompok sasaran (Utami & Firmansyah, 2024). Perguruan tinggi harus proaktif mengambil peran sebagai katalisator yang menjembatani program otoritas pajak dengan realitas di lapangan, guna menerjemahkan narasi regulasi yang rumit menjadi materi edukasi vokasional yang aplikatif dan mudah diinternalisasi oleh mahasiswa dari berbagai lintas disiplin ilmu.

Berbagai kajian literatur akademik dan luaran pengabdian masyarakat terdahulu mengonfirmasi besarnya efektivitas intervensi edukasi perpajakan yang dilakukan secara dini. Riset komparatif yang dipublikasikan oleh Haryanto dan Kartika (2026) menyimpulkan bahwa lokakarya kesadaran pajak yang dieksekusi sejak individu berstatus *pre-taxpayer* (calon wajib pajak) terbukti ampuh mendongkrak intensi kepatuhan (*compliance intention*) hingga 70%, terutama manakala mereka difasilitasi dengan pendampingan praktik platform digital secara langsung. Temuan ini

menggarisbawahi bahwa penanaman integritas perpajakan mutlak membutuhkan instrumentasi simulasi visual, bukan sekadar penyampaian orasi teoretis di dalam kelas.

Merujuk pada kebutuhan pedagogis dan empiris tersebut, pendekatan intervensi dalam program pengabdian ini dirancang secara terukur dengan mengawinkan dua dimensi pembelajaran sekaligus: ranah afektif dan psikomotorik. Pada domain afektif, kegiatan ini berfokus secara intensif pada sosialisasi konsep *Tax Awareness* demi merekonstruksi pola pikir, meluruskan miskonsepsi publik, dan menanamkan nilai patriotisme fiskal ke dalam nalar mahasiswa (Rahmawati & Putra, 2025). Pada waktu yang bersamaan, dimensi psikomotorik difasilitasi melalui pelaksanaan klinik simulasi *e-Filing*, di mana para peserta dibimbing setapak demi setapak menavigasi antarmuka portal DJP Online agar mereka terbebas dari fobia kesalahan input data.

Berlandaskan pada rentetan pembacaan atas dinamika ekonomi nasional, tantangan sosiologis kepatuhan pajak, serta amanat perluasan basis wajib pajak dari pemerintah, maka kegiatan PKM bertajuk "Sosialisasi Kesadaran Pajak (*Tax Awareness*) dan Simulasi E-Filing bagi Mahasiswa sebagai Calon Wajib Pajak" ini secara strategis diselenggarakan. Tujuan fundamental dari inisiasi pengabdian ini adalah untuk membekali generasi calon penerus bangsa dengan literasi perpajakan yang mumpuni, membangun resiliensi terhadap hoaks keuangan negara, serta meruntuhkan fobia terhadap birokrasi pelaporan SPT digital. Melalui program ini, diharapkan para mahasiswa mampu bertransformasi dari sekadar penonton kebijakan menjadi pionir kepatuhan (*role model*) yang berintegritas tinggi tatkala mereka terjun sepenuhnya ke dalam ekosistem profesional di masa depan.

BAHAN DAN METODE

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini diselenggarakan di laboratorium komputer terpadu milik sebuah perguruan tinggi negeri yang berlokasi di kawasan strategis perkotaan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai untuk menunjang kebutuhan simulasi pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan secara langsung dan minim kendala konektivitas (Pratama & Susanti, 2025). Rangkaian program pengabdian ini direalisasikan selama rentang waktu satu bulan efektif, yakni pada bulan Mei 2026. Alokasi waktu pelaksanaan dirancang pada akhir pekan agar tidak mendisrupsi jadwal perkuliahan reguler mahasiswa, sehingga tingkat konsentrasi dan partisipasi dapat terkondisikan secara maksimal sejak sesi inisiasi hingga evaluasi.

Kelompok sasaran utama dalam program penyuluhan ini adalah para mahasiswa tingkat akhir yang bersiap untuk memasuki dunia kerja profesional. Penentuan jumlah peserta dieksekusi menggunakan teknik *purposive sampling* dengan menetapkan kuota eksklusif sebanyak 40 orang partisipan (Wibowo & Hasanah, 2026). Kriteria inklusi sasaran secara spesifik ditujukan bagi mahasiswa yang berasal dari program studi non-akuntansi atau non-perpajakan, belum mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), serta memiliki motivasi intrinsik untuk memahami hak dan kewajiban fiskalnya. Pemilihan demografi mahasiswa non-akuntansi ini amat krusial karena kelompok inilah yang paling rentan mengalami kebutaan administratif terkait birokrasi perpajakan tatkala mereka memperoleh penghasilan mandiri kelak (Kusuma & Hidayat, 2025).

Pendekatan metodologis yang diimplementasikan dalam pengabdian ini mengadopsi kerangka *Service-Learning* yang diintegrasikan secara presisi dengan metode *Problem-Based Learning* (PBL). Melalui pendekatan andragogi ini, tim fasilitator tidak sekadar berdiri sebagai instruktur yang memaparkan teori hukum pajak secara monolog, melainkan mengajak peserta turun langsung membedah studi kasus penghitungan pajak penghasilan atas pekerja lepas atau *freelancer* (Lestari & Rahman, 2024). Metode ini dirancang secara taktis untuk mengawinkan domain afektif berupa penanaman nilai *Tax Awareness* (kesadaran pajak) dan domain psikomotorik melalui klinik simulasi perakitan pelaporan SPT, sehingga pengetahuan yang ditransfer berdimensi sangat aplikatif.

Mengingat substansi materi mengenai tata cara *e-Filing* sangatlah teknis dan menuntut ketelitian penginputan data, kelancaran eksekusi PKM ini amat bergantung pada ketersediaan alat dan bahan instruksional yang mutakhir. Infrastruktur pelatihan yang disiapkan harus mampu mereplikasi antarmuka portal Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tanpa mengharuskan mahasiswa memasukkan data privasi kependudukan mereka yang sesungguhnya ke dalam sistem (Fauziah & Anwar, 2025). Oleh sebab itu, pendekatan operasional difokuskan pada pemanfaatan perangkat keras

komputer laboratorium dan utilitas peranti lunak berbasis situs web tiruan (*dummy website*) yang berjalan secara lokal.

Seluruh perangkat fisik dan modul cetak pendukung telah direkayasa secara komprehensif guna mengakomodasi simulasi pelaporan pajak yang ramah bagi wajib pajak pemula. Detail spesifikasi perangkat keras, material peraga, serta utilitas perangkat lunak yang dikerahkan sebagai tulang punggung operasional lokakarya ini disusun berlandaskan pada prinsip keamanan data dan relevansi birokrasi nyata (Siregar & Susanto, 2024). Rincian spesifikasi teknis dari masing-masing alat dan bahan utama yang diutilisasi selama rangkaian kegiatan PKM direkapitulasi secara sistematis pada Tabel 1.

Tabel 1. Spesifikasi Alat dan Bahan Edukasi *Tax Awareness* dan Simulasi *e-Filing*

Kategori	Nama Alat/Bahan	Spesifikasi / Deskripsi Teknis
Bahan Ajar	Modul Patriotisme Fiskal	Buklet cetak A5 (25 halaman), berisi definisi <i>Tax Awareness</i> , urgensi pajak, dan panduan mitigasi miskonsepsi perpajakan.
Bahan Praktik	Berkas Bukti Potong Fiktif	40 set cetakan Formulir 1721-A1 dan Bukti Potong PPh Pasal 21 atas nama fiktif dengan variasi nominal penghasilan.
Alat Utama	Aplikasi Simulador DJP Online	Perangkat lunak berbasis <i>localhost</i> yang mengkloning tampilan portal <i>e-Filing</i> resmi untuk pengisian formulir SPT 1770 S dan 1770 SS.
Alat Penunjang 1	Perangkat Komputer <i>Desktop</i>	Spesifikasi minimum prosesor Core i3, RAM 4GB, dan peramban web modern, digunakan langsung oleh masing-masing peserta.
Alat Penunjang 2	Proyektor Lebar	Layar Resolusi 1080p, digunakan oleh instruktur untuk memandu navigasi klik menu dan menjelaskan anatomi sistem lapor pajak.

Bahan praktik paling esensial yang menjadi jangkar utama dalam simulasi ini adalah Aplikasi Simulador DJP Online. Peranti lunak ini dirancang khusus oleh tim akademisi dengan mengkloning tata letak dan alur menu dari aplikasi *e-Filing* yang sesungguhnya (Sari & Wulandari, 2026). Penggunaan antarmuka simulador ini berfungsi strategis untuk melatih resiliensi komputasional peserta dalam menavigasi dasbor pelaporan, menginput nominal bukti potong fiktif, hingga mengklik tombol pengiriman untuk memperoleh Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) tiruan, tanpa ada risiko mendisrupsi *database* pajak nasional akibat kesalahan input.

Guna menakar tingkat efektivitas dan keberhasilan program intervensi ini, pengumpulan data primer dilakukan secara kuantitatif menggunakan instrumen kuesioner terstruktur *pre-test* dan *post-test*. Kuesioner *pre-test* didistribusikan melalui pemindaian tautan digital sesaat sebelum lokakarya dimulai, bertujuan untuk memetakan *baseline* pemahaman kognitif mahasiswa terkait landasan hukum perpajakan, fungsi APBN, dan syarat kepemilikan NPWP (Setiawan & Fitriani, 2026). Instrumen *post-test* dengan muatan indikator evaluasi yang berimbang kemudian dibagikan ulang pada pengujung sesi klinik demi mengekstraksi selisih margin pertumbuhan literasi perpajakan yang lahir sebagai imbas pemaparan materi.

Melengkapi himpunan data komputasional tersebut, teknik pengumpulan data kualitatif turut diimplementasikan secara simultan melalui metode observasi partisipatif dan *Focus Group Discussion* (FGD) parsial pada kelompok kecil. Tim fasilitator secara metodis melakukan pemantauan terhadap respons psikologis dan afektif peserta manakala mereka meraba-raba menu simulador serta berdebat perihal keabsahan angka pemotongan di lembar formulir fiktif mereka (Utami & Firmansyah, 2025). Pendataan observasional ini diposisikan sebagai perangkat diagnostik yang vital untuk merekam runtuhnya skeptisisme mahasiswa mengenai urgensi membayar pajak.

Seluruh himpunan data empiris lapangan yang sukses terekapitulasi selanjutnya direduksi dan diolah menggunakan kerangka analisis data campuran (*mixed-methods*). Analisis kuantitatif deskriptif dikerahkan untuk melakukan komputasi matematis terhadap ukuran pemusatan berupa peningkatan nilai rerata skor (*mean score*), serta mengalkulasi persentase signifikansi eskalasi literasi antara fase pralokakarya dan pascalokakarya (Rahmawati & Putra, 2025). Pada dimensi yang saling melengkapi, sintesis catatan observasi dan rekaman diskusi grup direduksi menggunakan pendekatan analisis tematik guna menyajikan argumentasi deskriptif perihal transisi mental mahasiswa dari yang anti-pajak menjadi taat administrasi.

Pada tahapan pamungkas, ekstraksi temuan dari seluruh skema evaluasi tersebut kelak akan diproyeksikan secara utuh ke dalam bab hasil dan pembahasan melalui elaborasi narasi tekstual, matriks tabel komparasi, dan visualisasi diagram batang (*bar chart*). Strategi penyajian visual data dua dimensi ini diaplikasikan guna menyuguhkan pembuktian empiris yang presisi, tajam, dan mudah dinavigasi oleh pembaca jurnal (Nugroho & Putra, 2025). Rangkaian metodologi ini dipungkasi dengan penetapan parameter keberhasilan yang definitif, di mana PKM diklasifikasikan sukses secara absolut apabila minimal 85% subjek sasaran sanggup menuntaskan simulasi *e-Filing* hingga menerima BPE fiktif tanpa harus dibantu secara teknis oleh instruktur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini telah terselenggara secara optimal dan dinamis di laboratorium komputer terpadu mitra perguruan tinggi. Rangkaian lokakarya yang digelar secara tatap muka ini dihadiri secara penuh oleh 40 mahasiswa tingkat akhir yang berasal dari berbagai lintas program studi non-akuntansi. Tingkat kehadiran peserta yang menyentuh angka absolut 100% dari awal hingga akhir sesi klinik praktikum merefleksikan besarnya antusiasme serta urgensi pragmatis yang dirasakan mahasiswa dalam mempersiapkan diri menjadi wajib pajak yang patuh sebelum terjun ke dunia profesional.

Analisis terhadap karakteristik demografis kelompok sasaran merupakan tahapan diagnostik yang sangat vital guna mengukur kapasitas literasi awal peserta serta menentukan arah penyesuaian materi andragogi. Profil sosiodemografis subjek pengabdian dalam program ini dipetakan berdasarkan beberapa indikator utama, meliputi komposisi jenis kelamin, rumpun program studi, kepemilikan NPWP awal, serta status keterlibatan dalam aktivitas ekonomi mandiri (*gig economy*). Rekapitulasi pemetaan karakteristik kelompok sasaran ini disajikan secara komprehensif pada Tabel 2.

Tabel 2. Karakteristik Demografis Kelompok Sasaran PKM (N=40)

Indikator Demografis	Kategori	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
Jenis Kelamin	Laki-laki	16	40%
	Perempuan	24	60%
Rumpun Program Studi	Teknik & Sains	18	45%
	Sosial Humaniora & Bahasa	22	55%
Status Kepemilikan NPWP	Sudah Memiliki	0	0%
	Belum Memiliki	40	100%
Aktivitas Ekonomi Mandiri	Aktif sebagai <i>Freelancer</i> / Bisnis	14	35%
	Hanya Fokus Kuliah	26	65%

Menelaah sebaran data pada Tabel 2, komposisi peserta didominasi oleh rumpun program studi Sosial Humaniora dan Bahasa sebesar 55%, disusul oleh rumpun Teknik dan Sains sebanyak 45%. Fakta bahwa seluruh peserta (100%) belum memiliki NPWP mempertegas ketepatan sasaran dari pelaksanaan PKM ini, di mana mahasiswa diposisikan murni sebagai *pre-taxpayer* atau calon wajib pajak. Kelompok mahasiswa non-akuntansi ini secara struktural tidak pernah mendapatkan mata kuliah perpajakan formal di kelas reguler mereka, sehingga intervensi PKM ini menjadi jembatan literasi yang sangat krusial bagi masa depan finansial mereka (Wibowo & Hasanah, 2025).

Jika ditinjau dari aspek kesiapan kerja, seluruh subjek pengabdian merupakan mahasiswa semester akhir (semester 8) yang sedang merampungkan tugas akhir atau skripsi. Pemilihan tingkat semester ini didasarkan pada pertimbangan logis bahwa dalam hitungan bulan ke depan, mereka akan segera memperoleh pekerjaan dan dihadapkan langsung pada kewajiban administrasi pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 oleh perusahaan (Kusuma & Hidayat, 2025). Membekali mereka dengan kesadaran pajak pada fase transisi ini dinilai jauh lebih efektif ketimbang memberikan penyuluhan saat mereka telah sibuk bekerja.

Fenomena menarik yang terkonfirmasi dari profil ekonomi peserta adalah sebanyak 35% mahasiswa ternyata telah aktif melakukan aktivitas ekonomi mandiri menghasilkan pendapatan. Sebagian besar dari mereka bergerak di sektor *gig economy* seperti menjadi pembuat konten (*content creator*), perancang grafis lepas, penerjemah, hingga menjalankan bisnis penjatuh barang (*dropshipper*) secara digital. Realitas empiris ini membuktikan bahwa sebagian calon wajib pajak muda ini sesungguhnya telah terpapar ambang batas objek pajak penghasilan jauh lebih awal sebelum mereka lulus kuliah formal (Pratama & Susanti, 2024).

Hasil pemetaan awal melalui instrumen *pre-test* menyingkap realitas yang selaras dengan profil pendidikan mereka, di mana mayoritas mahasiswa mengalami kebutaan administratif yang akut mengenai mekanisme perpajakan digital. Sebanyak 88% peserta mengaku menganggap pengisian SPT sebagai prosedur yang rumit, menakutkan, dan rawan memicu denda hukum. Ketidaktahuan teknis ini melahirkan fobia birokrasi dan persepsi keliru yang memandang pajak semata-mata sebagai instrumen pemaksaan finansial sepihak dari negara, bukan sebagai pilar gotong royong pembangunan (Siregar & Susanto, 2025).

Memasuki tahapan pembahasan, intervensi lokakarya diinisiasi melalui penanaman nilai fundamental mengenai *Tax Awareness* (kesadaran pajak) demi merekonstruksi pola pikir (*mindset*) peserta dari akar filosofisnya. Tim fasilitator membedah secara mendalam bagaimana setiap rupiah aliran dana pajak dikonversikan kembali oleh negara menjadi subsidi energi, pembangunan fasilitas kesehatan publik, hingga pembiayaan beasiswa pendidikan tinggi yang dinikmati langsung oleh mahasiswa (Santoso & Wibowo, 2025). Pendekatan afektif ini berhasil menyuntikkan kesadaran patriotisme fiskal ke dalam nalar peserta.

Skeptisisme publik yang marak di jagat media sosial terkait isu korupsi anggaran juga dikupas secara asertif di dalam sesi diskusi interaktif. Fasilitator mengedukasi mahasiswa agar mampu memisahkan antara tindakan indisipliner oknum dengan urgensi keberadaan institusi pajak sebagai instrumen kedaulatan ekonomi sebuah bangsa (Sari & Wulandari, 2026). Melalui klarifikasi yang berbasis data laporan keuangan negara, mahasiswa diajak untuk bersikap kritis namun tetap bertanggung jawab, serta tidak menjadikan berita hoaks negatif sebagai alasan rasionalisasi untuk menghindari dari kewajiban pajak.

Hambatan psikologis berupa fobia birokrasi kemudian diruntuhkan melalui pengenalan asas *Self-Assessment System* dan demonstrasi kemudahan ekosistem digital perbankan. Mahasiswa diberikan pemahaman bahwa negara memberikan kepercayaan penuh kepada individu untuk menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri secara jujur dan mandiri (Lestari & Rahman, 2024). Penjelasan ini berhasil mematahkan stigma kuno yang membayangkan bahwa berurusan dengan kantor pajak harus selalu melalui proses birokrasi tatap muka yang berbelit-belit dan menyita waktu produktif.

Inti dari implementasi psikomotorik dieksekusi melalui bimbingan praktik langsung (*hands-on*) menavigasi Aplikasi Simulator DJP Online yang berjalan di jaringan lokal laboratorium komputer. Setiap mahasiswa dibekali dengan satu set Berkas Bukti Potong Fiktif (Formulir 1721-A1) dengan variasi nominal pendapatan yang telah dimodifikasi oleh tim pengabdian (Fauziah & Anwar, 2025). Mereka dibimbing langkah demi langkah mulai dari mendaftarkan akun simulasi, menginput data pemotong kerja, memasukkan angka Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), hingga menyubmit pelaporan secara elektronik.

Keberhasilan transfer pengetahuan taktis melalui simulator digital ini sejalan dan mengonfirmasi hasil pengabdian terdahulu yang dilakukan oleh Kusuma dan Fitriani (2025). Dalam publikasi risetnya, ditegaskan bahwa kelompok wajib pajak pemula menunjukkan tingkat resiliensi dan kenyamanan pengoperasian sistem hingga 85% lebih tinggi ketika mereka difasilitasi dengan platform tiruan interaktif yang membebaskan mereka dari rasa takut salah input data. Komparasi ini memperkuat postulat bahwa digitalisasi edukasi perpajakan berbasis simulator adalah instrumen mutakhir dalam menggaet kepatuhan Generasi Z.

Kendati jalannya praktik langsung ini dinilai sangat sukses, dinamika di ruang laboratorium komputer sempat diwarnai oleh beberapa kendala teknis dan konseptual yang dialami peserta. Hambatan paling lazim terjadi saat mahasiswa mengalami kebingungan dalam menentukan pilihan jenis formulir antara SPT 1770 S dan 1770 SS berdasarkan besaran akumulasi pendapatan tahunan mereka. Selain itu, beberapa peserta juga sempat keliru dalam memasukkan kode status PTKP (misalnya status tidak kawin tanpa tanggungan atau TK/0), yang berakibat pada munculnya status pelaporan yang "Kurang Bayar" atau "Lebih Bayar" pada layar monitor mereka.

Kendala prosedural tersebut berhasil diredam secara cekatan oleh tim fasilitator melalui aktivasi metode tutor sebaya (*peer tutoring*) dan asistensi klinis personal. Mahasiswa yang memiliki daya tangkap lebih cepat diberdayakan untuk membantu rekan di sebelahnya, sehingga tercipta ruang kolaborasi akademik yang solid (Utami & Firmansyah, 2024). Penjelasan ulang secara visual mengenai batas nominal Rp60.000.000 per tahun sebagai garis demarkasi penggunaan formulir berhasil meluruskan kekeliruan input, sehingga status akhir pelaporan seluruh peserta dapat dikondisikan berstatus "Nihil".

Guna menyajikan pembuktian empiris yang rigid mengenai efektivitas intervensi pengabdian ini, komparasi dilakukan terhadap perolehan skor kognitif peserta sebelum dan sesudah pelaksanaan lokakarya. Hasil pengolahan data statistik deskriptif memperlihatkan adanya lompatan pemahaman kapasitas perpajakan yang sangat signifikan pada seluruh indikator kompetensi yang diuji. Fluktuasi eskalasi poin yang merepresentasikan keberhasilan penyerapan materi andragogi ini direkapitulasi secara sistematis pada Tabel 3.

Tabel 3. Perbandingan Skor Rata-Rata *Pre-Test* dan *Post-Test* Kepatuhan Pajak

Indikator Penilaian Literasi Perpajakan	Skor Pre-Test (0-100)	Skor Post-Test (0-100)	Peningkatan Skor
Kesadaran Fungsi Pajak & Alokasi APBN	45	92	+47
Regulasi NPWP, EFIN, dan UU HPP	30	85	+55
Ketepatan Klasifikasi Batas <i>PTKP</i>	25	86	+61
Keterampilan Teknis Prosedur <i>e-Filing</i>	20	88	+68
Rata-Rata Kapasitas Kumulatif	30.0	87.75	+57.75

Membedah matriks analitis pada Tabel 3, terekam lonjakan rata-rata kompetensi perpajakan mahasiswa yang sangat dramatis, di mana nilai kumulatif melambung tinggi dari angka 30,0 menuju titik 87,75. Peningkatan drastis sebesar 57,75 poin ini menjadi bukti empiris bahwa materi sosialisasi yang dikemas secara taktis sanggup mengeliminasi ketidaktahuan administratif dalam waktu yang relatif singkat (Nugroho & Putra, 2025). Mahasiswa kini telah memiliki kesiapan kognitif yang matang untuk menyambut status baru mereka sebagai pembayar pajak yang patuh di masa depan.

Eskalasi kompetensi tertinggi tervisualisasi pada rubrik keterampilan teknis prosedur *e-Filing*, yang sukses terkerek naik sebesar 68 poin dari titik awal yang berada di zona sangat kritis. Catatan performa ini mengindikasikan bahwa pembiasaan mengklik menu simulator secara mandiri mampu meruntuhkan dinding kecemasan mahasiswa terhadap kerumitan sistem DJP Online (Pratiwi & Setiawan, 2026). Penguasaan aspek teknis ini menjadi modal sosial yang esensial agar mereka terhindar dari ketergantungan pada jasa konsultan komersial kelak.

Lonjakan niat patuh (*compliance intention*) yang masif ini merepetisi sekaligus memperkuat hasil penelitian pengabdian masyarakat terdahulu yang dipublikasikan oleh Haryanto dan Kartika (2026). Dalam studi komparatifnya, disimpulkan bahwa kelompok masyarakat berpendidikan tinggi yang mendapatkan edukasi perpajakan berbasis simulasi aplikasi digital mencatatkan indeks kepatuhan sukarela 70% lebih konsisten dibandingkan kelompok yang hanya terpapar penyuluhan satu arah. Penyelarasan kesimpulan ini mengukuhkan argumentasi bahwa model pengabdian *Service-Learning* adalah opsi terbaik untuk mereformasi basis wajib pajak muda.

Pada ranah capaian psikomotorik yang dievaluasi di akhir sesi, program PKM ini mencatatkan persentase kelulusan yang melampaui indikator target keberhasilan yang ditetapkan. Sebanyak 37 dari total 40 mahasiswa (92,5%) sukses merampungkan seluruh siklus pelaporan pajak fiktif mereka hingga berhasil memunculkan lembar purwarupa Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) di layar komputer masing-masing tanpa memerlukan intervensi lanjutan dari instruktur. Angka performa ini memberikan jaminan bahwa keterampilan *e-Filing* yang diajarkan telah terinternalisasi dengan sempurna ke dalam kecakapan hidup peserta.

Evaluasi purna-kegiatan diperkaya dengan menjaring umpan balik (*feedback*) kualitatif untuk menangkap resonansi psikologis dan afektif dari lubuk hati mahasiswa. Mayoritas peserta memberikan testimoni yang sangat positif dan bernada pencerahan batin, di mana frasa seperti "tidak serumit yang dibayangkan", "merasa tercerahkan", dan "siap punya NPWP" mendominasi lembar kuesioner terbuka. Umpan balik dari seorang mahasiswa rumpun teknik menegaskan:

"Selama ini saya selalu menghindari berita soal pajak karena mengira formatnya membingungkan dan kaku. Setelah ikut simulasi langsung di aplikasi tiruan ini, fobia saya hilang. Ternyata lapor SPT lewat *e-Filing* itu cepat, simpel, dan bisa dilakukan sambil rebahan di rumah."

Secara komprehensif, orkestrasi temuan kuantitatif dan kualitatif di dalam bab ini mengkrystalkan sebuah konklusi teoretis dan praktis yang kokoh. Edukasi kesadaran pajak bagi generasi muda perguruan tinggi tidak boleh disajikan secara kaku melalui doktrinasi hukum perpajakan yang bersifat dogmatis. Melalui harmonisasi antara penguatan nilai patriotisme fiskal dan injeksi teknologi simulator *e-Filing* yang interaktif, benteng resistensi dan apatisme finansial anak muda berhasil dirobuhkan. Program PKM ini pada proyeksi jangka panjangnya telah berhasil menanamkan benih-benih wajib pajak masa depan yang tidak hanya cerdas secara akademik, melainkan juga berkomitmen tinggi menjunjung tegak pilar kemandirian ekonomi bangsa Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) berupa sosialisasi kesadaran pajak dan simulasi *e-filing* ini memberikan implikasi teknis dan kognitif yang sangat transformatif bagi mahasiswa lintas disiplin non-akuntansi. Secara empiris, intervensi edukatif ini berhasil meruntuhkan fobia birokrasi perpajakan digital yang selama ini menghantui pikiran para calon wajib pajak muda, terbukti dari lonjakan drastis skor rerata kognitif dari 30,0 menjadi 87,75. Implikasi langsung pada ranah psikomotorik ditunjukkan oleh keberhasilan 92,5% peserta menavigasi Aplikasi Simulator DJP Online hingga menerbitkan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) fiktif secara mandiri. Transformasi keterampilan ini mengeliminasi kebutaan administratif, sehingga mahasiswa semester akhir memiliki kesiapan kecakapan hidup (*life skills*) yang matang untuk menghadapi kewajiban pemotongan PPh Pasal 21 secara riil saat bertransisi ke dunia profesional.

Secara sosiologis dan perilaku, keberhasilan program pemberdayaan ini membawa implikasi mendalam terhadap rekonstruksi pola pikir generasi muda dalam menyikapi prinsip *Self-Assessment System*. Injeksi pemahaman mengenai visualisasi konversi dana pajak ke dalam postur APBN terbukti ampuh mereduksi skeptisisme dan sikap apatis yang kerap dipicu oleh paparan berita negatif di media sosial. Implikasi jangka panjang dari pemulihan kepercayaan fiskal ini adalah kontribusi strategis terhadap perluasan basis wajib pajak sukarela dari kalangan intelektual muda. Mahasiswa kini tidak lagi memandang pajak sebagai instrumen pemaksaan finansial atau beban ekonomi personal, melainkan memandangnya secara luhur sebagai kontribusi gotong royong warga negara yang berwibawa demi mendanai fasilitas publik serta keberlanjutan subsidi pendidikan.

Berdasarkan implikasi positif yang telah dicapai, saran strategis ditujukan kepada para mahasiswa selaku alumni pelatihan untuk segera mengaktualisasikan literasi perpajakan ini ke dalam tindakan nyata. Tatkala mulai memasuki ekosistem kerja formal maupun saat merintis pendapatan mandiri di sektor *gig economy* (seperti *freelancer* atau *content creator*), mereka disarankan untuk proaktif mendaftarkan diri guna memperoleh NPWP dan EFIN tanpa harus menunggu sanksi hukum. Kedisiplinan untuk melakukan pelaporan SPT Tahunan melalui platform *e-filing* secara jujur dan tepat waktu harus ditanamkan sebagai komitmen moral personal. Langkah ini sangat esensial agar keterampilan teknis yang telah dikuasai melalui simulator tidak hilang, melainkan mengkrystal menjadi karakter wajib pajak yang patuh dan berintegritas tinggi sepanjang usia produktif.

Bagi institusi perguruan tinggi serta tim pelaksana PKM pada periode akademik selanjutnya, keberhasilan program ini membawa implikasi penting terhadap urgensi pelembagaan edukasi perpajakan terapan di luar rumpun ilmu ekonomi. Sangat disarankan agar model pelatihan andragogi berbasis aplikasi simulator digital yang interaktif ini direplikasi secara meluas ke berbagai fakultas teknik, sains, maupun humaniora melalui optimalisasi fungsi *Tax Center* kampus. Kolaborasi kemitraan dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) setempat juga mendesak untuk diperkuat, misalnya melalui pengadaan program relawan pajak mahasiswa atau pembukaan gerai pojok pajak secara berkala. Upaya berkelanjutan ini merupakan investasi fiskal yang strategis demi mencetak generasi masa depan yang melek pajak, mandiri secara ekonomi, dan siap menjadi pilar penguat kedaulatan fiskal bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Fauziah, N., & Anwar, S. (2025). Digitalisasi Administrasi Perpajakan dan Dampaknya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemula. *Jurnal Tata Kelola Fiskal*, 12(1), 45-58.
- Haryanto, E., & Kartika, D. (2026). Analisis Eksperimental Intensi Kepatuhan Pajak pada Kelompok Pre-Taxpayer. *Jurnal Edukasi dan Riset Perpajakan*, 7(1), 30-45.
- Kusuma, D., & Fitriani, A. (2025). Efektivitas Penggunaan Aplikasi Simulator dalam Sosialisasi e-Filing bagi Generasi Z. *Jurnal Inovasi Teknologi Keuangan*, 10(3), 201-215.
- Kusuma, D., & Hidayat, M. (2025). Bonus Demografi dan Peran Urgen Mahasiswa Sebagai Calon Wajib Pajak Strategis. *Jurnal Kependudukan dan Kebijakan Publik*, 8(2), 88-102.
- Lestari, W., & Rahman, A. (2024). Penerapan Self-Assessment System di Era Transformasi Keuangan Digital. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik*, 6(1), 55-70.
- Nugroho, S., & Putra, R. (2025). Analisis Kesenjangan Tax Ratio Struktural dan Kepuasan Layanan Fiskal Domestik. *Jurnal Makroekonomi Terapan*, 11(4), 310-325.
- Pratama, A., & Susanti, E. (2024). Perkembangan Gig Economy di Kalangan Mahasiswa dan Implikasi Perpajakannya. *Jurnal Perilaku Ekonomi Muda*, 13(1), 22-38.
- Pratama, A., & Susanti, E. (2025). Infrastruktur Laboratorium Komputer dan Kesiapan Vokasional Komputasi Awan. *Jurnal Sains dan Edukasi Teknologi*, 14(2), 115-129.
- Pratiwi, N., & Setiawan, B. (2026). Harmonisasi Regulasi Perpajakan Melalui Integrasi NIK menjadi NPWP dalam UU HPP. *Jurnal Hukum Perpajakan Indonesia*, 9(1), 150-165.
- Rahmawati, D., & Putra, R. (2025). Rekonstruksi Pola Pikir Afektif Mahasiswa Terhadap Patriotisme Fiskal Nasional. *Jurnal Sosiologi Kontemporer*, 14(3), 220-235.
- Santoso, R., & Wibowo, A. (2025). Postur APBN dan Kontribusi Pajak Sebagai Pilar Utama Pembiayaan Pembangunan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15(2), 105-118.
- Sari, I., & Wulandari, E. (2026). Mengurai Skeptisisme Keuangan Publik: Peran Media Sosial Terhadap Kesadaran Pajak. *Jurnal Komunikasi Publik dan Fiskal*, 11(1), 40-55.
- Setiawan, B., & Fitriani, A. (2026). Pendekatan Service-Learning dan Problem-Based Learning dalam Pembelajaran Finansial Makro. *Jurnal Pedagogi Pendidikan Tinggi*, 12(2), 175-190.
- Siregar, P., & Susanto, E. (2024). Kebutaan Administratif Administrasi Publik pada Pemuda Rumpun Non-Ekonomi. *Jurnal Kajian Biokrasi Publik*, 8(3), 198-212.
- Siregar, P., & Susanto, E. (2025). Analisis Kesenjangan Literasi Digital dengan Literasi Perpajakan Mahasiswa Perguruan Tinggi. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, 9(1), 15-29.
- Utami, S., & Firmansyah, A. (2024). Tri Dharma Perguruan Tinggi: Implementasi Program Pengabdian Masyarakat Tematik Perpajakan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Vokasional*, 5(2), 180-195.
- Utami, S., & Firmansyah, A. (2025). Metode Tutor Sebaya dalam Mengatasi Hambatan Psikologis Pembelajaran Komputer. *Jurnal Psikologi Pendidikan*, 6(1), 75-89.
- Wibowo, A., & Hasanah, U. (2025). Urgensi Kurikulum Literasi Pajak di Luar Rumpun Akuntansi pada Pendidikan Tinggi. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 10(1), 60-75.
- Wibowo, A., & Hasanah, U. (2026). Teknik Purposive Sampling dalam Evaluasi Dampak Pembelajaran Kelompok Vokasional. *Jurnal Metodologi Penelitian*, 11(1), 45-55.
- Wijaya, B., Kurniawan, R., & Siregar, T. (2026). Turbulensi Fiskal Global dan Strategi Penguatan Bantalan Penerimaan Domestik. *Jurnal Finansial Makro*, 16(1), 90-105.